

PERSPEKTIF DAN PERAN SOSIOLOGI EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT

Perspective and Role of Economic Sociology in Economic Development

Ketut Gede Mudiarta

*Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No. 10 Bogor 16114*

Naskah masuk : 25 April 2011

Naskah diterima : 6 Juni 2011

ABSTRACT

Economic sociology is a sociological perspective that explains economic phenomena, mainly related to aspects of production, distribution, exchange, consumption of goods, services, and resources, aiming at improving people's welfare. Contribution of the sub-discipline of economic sociology improves along with the various socio-economic problems in the society both in developed and developing countries where they try to improve people's welfare through its development programs. Progress of economic sociology cannot be separated from the ideas of classical sociology and new thinking in economic sociology since 1980s. Economic sociology studies in Indonesia showed that most of the studies are directed toward on how the community alleviates poverty. Currently, economic sociology studies social capital, as well as structural problems, institutional and national economic systems associated with welfare. The said national economic system is in accordance with the country's constitution. On the other hand, the impacts of national development are also the focus of the studies since the development policies have not been able to realize a welfare society and inclusiveness in national development. It is based on the construction of the welfare state model with the main indicator of relatively equal development.

Key words: *economic sociology, people's welfare, social capital*

ABSTRAK

Sosiologi Ekonomi merupakan perspektif sosiologis yang menjelaskan fenomena ekonomi, terutama terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi barang, jasa, dan sumber daya, yang bermuara pada bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraan. Sosiologi Ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan pembangunan. Perkembangan studi Sosiologi Ekonomi tidak terlepas dari pengaruh pemikiran tokoh sosiologi klasik dan aliran pemikiran baru dalam sosiologi ekonomi sejak dekade 1980-an. Hasil kajian eksploratif yang pada tulisan ini melalui penelusuran atas perkembangan studi Sosiologi Ekonomi di Indonesia, menunjukkan bahwa sebagian besar studi diarahkan kepada bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran atau kesejahteraan yang erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Saat ini studi Sosiologi Ekonomi lebih marak menganalisis tentang kapital sosial, serta masalah struktur, kelembagaan dan sistem ekonomi nasional dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi nasional yang dimaksud adalah yang sejalan amanat konsitusi kita. Pada sisi lain, dampak pembangunan nasional terutama sejak masa orde baru juga banyak diteliti mengingat kebijakan pembangunan dinilai belum mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, bahkan terkesan belum berhasil menciptakan inklusifitas dalam pembangunan nasional, berlandaskan pembangunan model negara kesejahteraan (MNK) dengan indikator utama berupa "pemerataan" pembangunan.

Kata kunci : *sosiologi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kapital sosial*

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran Sosiologi Ekonomi antara lain ditandai oleh berkembangnya pemikiran dan teori tentang ekonomi, yang melihat cara kerja sistem ekonomi dengan menekankan pula pada aspek non-ekonomi. Pada beberapa dekade belakangan ini, perkembangan studi Sosiologi Ekonomi semakin tumbuh dan berkembang sejalan dengan fenomena ekonomi yang tentunya tidak terlepas dari cakupan aspek sosiologis yang melingkupinya. Pada sisi lain, persoalan ekonomi setiap waktu semakin kompleks dan merambah segi kehidupan non ekonomi.

Pada sisi lain, kecendrungan sosiolog memperluas fokus analisis pada bidang yang menjadi tradisi kajian ekonomi melahirkan sub disiplin Sosiologi Ekonomi. Menurut Smelser dan Swedberg (2005) sosiologi ekonomi memfokuskan perhatian tentang fenomena ekonomi, terutama yang terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa sebagai sumber daya yang terbatas. Perspektif itu meliputi interaksi personal, kelompok (grup), struktur sosial, kelembagaan, dan kontrol sosial termasuk sanksi, norma, dan nilai. Dalam perkembangan selanjutnya, kontribusi sub disiplin Sosiologi Ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat, baik di negara maju maupun di negara berkembang yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan pembangunan.

Tulisan ini sengaja menetapkan topik kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif sosiologi ekonomi, yang secara umum bertujuan untuk berupaya menjelajahi tradisi pemikiran para sosiolog dari tokoh klasik sosiologi maupun yang berkembang saat ini. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk dapat memahami gagasan sosiologis dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di Indonesia. Secara spesifik penulisan ini bertujuan untuk: (i) mendiskripsikan perkembangan terkini (*state of the art*) teori sosiologi ekonomi dan menyelami indikator yang relevan; (ii) memberikan gambaran perkembangan studi sosiologi ekonomi yang telah

dilakukan di Indonesia, serta (iii) memberikan gambaran kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia yang relevan dengan sosiologi ekonomi. Selanjutnya, ketiga tujuan spesifik itu dirangkaikan dengan dinamika pembangunan nasional (pembangunan sosial ekonomi) di Indonesia, yang memiliki tujuan utama mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat.

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SOSIOLOGI EKONOMI

Keterkaitan Ekonomi dan Sosiologi.

Smelser dan Swedberg (2005) mengemukakan definisi sosiologi ekonomi dengan mengadopsi pendapat Weber maupun Durkheim, bahwa sosiologi ekonomi merupakan sub disiplin sosiologi yang memfokuskan bidang studi pada bagaimana aktor atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

“Economic sociology can be defined as the sociological perspective applied to economic phenomena. A similar but more elaborate version is the application of the frames of reference, variables, and explanatory models of sociology to that complex of activities which is concerned with the production, distribution, exchange, and consumption of scarce good and services”.

Definisi di atas, menjelaskan dua terminologi tentang fenomena ekonomi, dan pendekatan sosiologis. Fenomena ekonomi yang menjadi fokus perhatian adalah mengenai cara aktor memenuhi kebutuhan, dan di dalamnya terkandung aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi sumberdaya yang pada dasarnya bermuara pada kesejahteraan aktor. Sedangkan pendekatan sosiologisnya meliputi kerangka acuan, variabel dan indikator, serta model-model yang digunakan sosiolog dalam memahami ataupun menjelaskan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, terdapat perbedaan pendekatan ataupun cara pandang dari sudut ekonomi dan sosiologi ekonomi terutama dalam memandang aspek produksi, distribusi dan pertukaran, serta konsumsi sebagai komponen kegiatan ekonomi masyarakat.

Konsep Aktor

Pada dasarnya *starting point* analisis ekonomi didasari individu. Hal ini dilandasi paham utilitarianisme dan ekonomi politik yang dalam menjelaskan transaksi ekonomi semuanya dilandasi individualisme. Hal ini juga didasari pemikiran dari Adam Smith dalam karyanya "*An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*" yang ditulis pada tahun 1776. Gagasan mengenai prinsip individualisme dikemukakan dengan berpandangan bahwa motif manusia melakukan kegiatan ekonomi didasari oleh interes pribadi. Motif kepentingan individu yang didorong aliran pemikiran liberalisme akhirnya melahirkan sistem ekonomi pasar bebas yang berkembang menjadi sistem ekonomi kapitalis.

Konsep utama dari Smith adalah "*laissez faire*", yakni kurangnya intervensi pemerintah (negara) dalam sistem ekonomi masyarakat yang menciptakan adanya individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Muara dari keseluruhan pemikiran itu adalah terciptanya individu manusia ekonomis (*homo economicus*) yang mengutamakan kepentingan individu dan sangat mengedepankan rasionalitas penuh (Heilbroner, 1986). Sementara, utilitarianisme (rasionalitas utilitarianisme) itu sendiri menurut Lawang (2005) adalah prinsip utama dari ekonomi.

Tindakan Ekonomi

Ekonomi mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki pilihan-pilihan ataupun preferensi tertentu. Tindakan individu bertujuan untuk memaksimalkan utilitas dan keuntungan yang selanjutnya dalam ekonomi disebut prinsip rasionalitas. Akan tetapi pandangan tersebut berbeda dari sudut pandang sosiologi, yakni seperti yang dikemukakan Weber mengenai tindakan yang dalam sosiologi dibedakan menjadi tindakan rasional dan tindakan tradisional (afektual).

Para ekonom cenderung menganggap bahwa tindakan ekonomi dapat ditarik dari hubungan antara preferensi selera dengan harga ataupun jasa pada sisi lainnya. Sementara pandangan sosiolog memberi makna tindakan aktor yang dikonstruksi secara historis. Mengenai tindakan ekonomi, para

ekonomi relatif tidak memperhatikan aspek *power* atau kekuasaan karena menurut sudut pandang ekonomi tindakan ekonomi dianggap sebagai pertukaran diantara yang sederajat. Sedangkan menurut sosiologi tidaklah demikian, melainkan *power* ataupun kekuasaan dipandang sebagai salah satu dimensi yang penting dalam menentukan tindakan ekonomi (Smelser dan Swedberg, 2005)

Hambatan Tindakan Ekonomi

Masih menurut Smelser dan Swedberg, (2005: 5), hal yang sangat mendasar bagi ekonomi dalam memandang hambatan tindakan ekonomi seseorang adalah selera dan adanya kelangkaan sumber daya, termasuk keterbatasan dalam penguasaan teknologi. Dalam kerangka ini, ekonom mudah untuk melakukan prediksi atas tindakan ekonomi yang didasari prinsip memaksimalkan pemanfaatan (utilitas) dan keuntungan. Sementara sosiologi lebih luas dari itu, yakni hambatan aktor dalam melakukan tindakan ekonomi juga dibatasi oleh beberapa faktor seperti hubungan antar aktor, selain terbatasnya sumber daya.

Hubungan Ekonomi dan Masyarakat

Fokus perhatian utama dari ekonom adalah aspek pertukaran ekonomi, pasar, dan ekonomi. Sementara masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar itu dan dipandang sudah ada. Hal itu berbeda dari sudut pandang sosiolog, yakni memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial dan ekonomi merupakan bagian integral dari sistem masyarakat. Oleh karena itu, Smelser dan Swedberg (2005) mengemukakan bahwa sosiologi ekonomi lebih banyak memfokuskan perhatian pada: (i) analisis sosiologis tentang proses-proses ekonomi, antara lain seperti terbentuknya harga (kesepakatan) antara pelaku atau aktor ekonomi; (ii) analisis hubungan interaksi antara ekonomi dan institusi lain dalam masyarakat, antara lain dapat kita analisis hubungan antara ekonomi dan agama, ataupun politik, birokrasi, dan institusi lainnya; (iii) analisis mengenai dinamika kelembagaan dan parameter budaya yang menjadi landasan ekonomi masyarakat.

Beberapa Aliran Pemikiran yang Mempengaruhi Sosiologi Ekonomi Saat Kini

Studi mengenai tindakan aktor dalam fenomena ekonomi pada dasarnya cenderung terfokus untuk menganalisis bagaimana masyarakat bertahan hidup melalui pemenuhan kebutuhan hidupnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara historis perkembangan Sosiologi Ekonomi diawali dengan perkembangan kehidupan ekonomi modern dengan ciri berkembangnya masyarakat industri pasca masyarakat agraris yang mengandalkan kegiatan pertanian sebagai dasar kegiatan perekonomian masyarakat. Pasca pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh sosiologi klasik khususnya Sosiologi Ekonomi, sejak dekade 1980-an muncullah aliran pemikiran baru dalam sosiologi ekonomi (Smelser dan Swedberg, 2005). Aliran pemikiran baru antara lain terangkum dalam teori Granovetter (1985) mengenai keterlekatan (*embeddedness*) meletakkan jaringan sosial (*network*) sebagai titik sentral pemikirannya. Lebih jauh dan yang relatif terbaru dari Granovetter (2005) adalah gagasan mengenai pengaruh struktur sosial terutama yang dibentuk berdasarkan jaringan sosial (*network*), terhadap manfaat ekonomis khususnya menyangkut kualitas informasi.

Kemudian, Smelser dan Swedberg (2005; 4-5) juga lebih detail menjelaskan peranan penting dari aliran pemikiran sosiologi struktural bagi studi-studi Sosiologi Ekonomi. Proposisi utama dari aliran itu adalah bahwa relasi aktor dan posisi aktor dalam struktur sosial merupakan hal yang krusial dalam proses-proses sosialnya. Kemudian berkembang lebih jauh studi-studi jaringan sosial di pertengahan tahun 1970-an hingga tahun 1990-an yang banyak memfokuskan perhatian pada jaringan kerja korporasi dan sektor industri yang erat pertaliannya dengan teori-teori organisasi dengan memfokuskan perhatian pada keterkaitan antara korporasi dengan lingkungan sosialnya. Terdapat tiga ranah utama yang menjadi fokus perhatian studi Sosiologi Ekonomi melalui penerapan teori organisasi, yakni dalam ranah ketergantungan terhadap sumberdaya, ekologi kependudukan, dan *new institutionalism*. Disamping itu, perkembangan Sosiologi Ekonomi baru saat ini turut dipengaruhi pula oleh penerapan Sosio-

logi Kultural dan pemikiran-pemikiran komparatif - historis.

Aliran ini berkembang pertama kali saat mencetuskan beberapa proposisi utama yang digagas antara lain oleh Harisson White (dari Harvard University), dan murid-muridnya seperti Granovetter yang juga didukung Swedberg dan beberapa tokoh pemikir Sosiologi Ekonomi baru. Proposisi yang dimaksud adalah: (i) tindakan ekonomi adalah suatu bentuk dari tindakan sosial, (ii) tindakan ekonomi disituasikan secara sosial, dan (iii) institusi-institusi ekonomi dikonstruksi secara sosial. Ketiga proposisi tersebut bersumber dari gagasan Weber mengenai tindakan sosial. Menurut Weber tindakan ekonomi tidak semata-mata dipandang sebagai fenomena stimulus-respon yang sederhana, melainkan lebih kepada hasil dari suatu proses yang dilakukan oleh individu dalam hubungan sosial yang berlangsung (Sukidin, 2009).

Kekuatan dan Perkembangan Teori-teori Sosiologi Ekonomi

Dilandasi *grand theory* yang dicetuskan tokoh-tokoh klasik sosiologi (Marx, Durkheim, Weber, dan Simmel), muncul teori-teori pada tataran *middle range theory* bahkan hingga melahirkan pemikiran teoritis di level mikro. Berikut ini akan dikemukakan beberapa catatan ringkas mengenai perkembangan teori Sosiologi Ekonomi yang dominan mempengaruhi studi-studi sampai era kini. Mengingat sedemikian banyaknya teori yang berkembang saat ini, maka pada bahasan ini disarikan beberapa teori penting yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar bagi perkembangan terkini (*state of the art*) studi-studi Sosiologi Ekonomi di Indonesia, antara lain teori pilihan rasional (Coleman), Teori Jaringan Sosial dengan Ketertambatan Sosial (Granovetter), dan teori New Institutionalism seperti berikut ini.

Teori Pilihan Rasional (James S Coleman 1988; 1990)

Teori pilihan rasional berada dalam tataran *middle range theory* yang berlandaskan kepada teori umum (*grand theory*), yakni tindakan rasional yang digagas oleh Max Weber. Berlandaskan *grand theory* dari Weber

mengenai rasionalitas atau lebih spesifiknya adalah tindakan rasional, serta perspektif pilihan rasional pada tataran *middle range theory* seperti yang dikemukakan oleh Coleman, maka periode waktu terakhir ini berkembang studi-studi yang mengkaji kapital sosial secara khusus, dan representasi kapital secara umum dari sudut pandang Sosiologi Ekonomi, dikaitkan dengan pengambilan keputusan transaksi sosial ekonomi.

Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan di atas maka dalam tindakan rasional ada beberapa kata kunci yang harus dikaitkan satu dengan yang lainnya, yakni aktor (yang diasumsikan rasional); pilihan dari beragam sumber yang tersedia; penguasaan atas sumber-sumber itu oleh si aktor; dan kepentingan pribadi. Dengan demikian timbul pertanyaan mengapa Coleman tidak mengacu kepada pemikiran Fungsionalisme Struktural dalam menjelaskan teori pilihan rasional. Hal ini tidak terlepas dari kritiknya terhadap aliran sosiologi dan aliran ekonomi, yakni dua aliran yang berupaya menjelaskan kapital sosial hingga dekade 1980-an.

Kritik yang dikemukakan adalah mengenai cacat yang sangat fatal bagi perkembangan teori yang tidak mempertimbangkan atau mengabaikan aktor yang memiliki dalam tanda petik "mesin tindakan". Kritik itu ditujukan kepada aliran sosiologi yang menganggap aktor itu dibentuk oleh lingkungan (sistem atau struktur), bersifat pasif, serta tidak memiliki kekuatan dari dalam untuk menentukan tindakannya. Faktanya dalam dunia sosial tidaklah demikian. Menurut Coleman, individu manusia bukan hanya sekedar tempat ataupun media bagi bekerjanya suatu struktur sosial.

Teori Jaringan Sosial (Granovetter, 1985; 2005)

Granovetter mengetengahkan gagasan mengenai pengaruh struktur sosial terutama yang dibentuk berdasarkan jaringan sosial (network), terhadap manfaat ekonomis khususnya menyangkut kualitas informasi. Ia lebih lanjut menjelaskan empat prinsip utama yang melandasi pemikiran mengenai adanya hubungan pengaruh antara jaringan sosial (network) dengan manfaat ekonomi, yakni: (i) *Norma dan densitas network*; (ii) *The Strength*

of Weak Ties yakni manfaat ekonomi, yang ternyata cenderung didapat dari jalinan ikatan yang lemah. Untuk hal ini ia menjelaskan bahwa pada tataran empiris, informasi baru misalnya, akan cenderung didapat dari kenalan baru dibandingkan dengan teman dekat yang umumnya memiliki wawasan yang hampir sama dengan individu, dan kenalan baru relatif membuka cakrawala dunia luar individu.; (iii) *The Importance of Structural Holes*, yakni adanya peran lubang struktural diluar ikatan lemah maupun ikatan kuat yang ternyata berkontribusi untuk menjembatani relasi individu dengan pihak luar (outsider) dan (iv) *The Interpenetration of Economic and Non-Economic Action* yaitu adanya kegiatan-kegiatan non ekonomis yang dilakukan dalam kehidupan sosial individu yang ternyata mempengaruhi tindakan ekonominya. Dalam hal ini Granovetter menyebutnya ketertambatan tindakan non ekonomi dalam kegiatan ekonomi sebagai akibat adanya jaringan sosial.

Teori New Institutionalism (Nee, 2005)

Secara ringkas pemikiran Nee (2005) mengenai new institutionalism diawali dengan gagasannya untuk menjelaskan bagaimana institusi berinteraksi dengan jaringan sosial (social network) dan norma-norma sosial dalam mengarahkan tindakan-tindakan ekonomi. Ia memulainya dengan menjelaskan pendekatan yang dikemukakan oleh Granovetter dalam memandang jaringan sosial yang menyatakan bahwa aktor ekonomi bukan atom (lepas dari konteks masyarakat), bukan pula sepenuhnya patuh pada aturan sosial; tingkah laku aktor melekat pada realitas relasi sosial (*concrete, on-going social relation*); Hubungan sosial bukan institusi; institusi makro melahirkan *trust* dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini pandangan *New Institutionalism* mengemukakan bahwa Granovetter hanya menjelaskan *proximate causes* tanpa menjelaskan *large/macro causes*; Juga menurut Nee, Granovetter tidak menjelaskan mengapa aktor decouple (terpisah/terlepas) dari hubungan sosial untuk mengejar kepentingan ekonomi? Berlandaskan kepada kritik terhadap pendekatan *New Institutional Economic* dan mencermati pandangan Granovetter di atas, Nee mengemukakan model institusional baru dari perspektif Sosiologi Ekonomi.

Model ini memandang mekanisme institusional memiliki penyebab yang lebih dalam karena sangat menentukan insentif. Dalam pandangan New Institusional Sosiologi Ekonomi, norma-norma yang ada akan berinteraksi dengan *formal rules* dalam merealisasikan kepentingan individu. Pada intinya, Nee (2005) mengemukakan adanya mekanisme integrasi hubungan formal dan informal pada setiap level kausal, yakni pada tataran mikro (individu), meso (kelompok ataupun organisasi), dan tataran makro berupa lingkungan kebijakan (*policy environment*), termasuk ketentuan dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis.

APLIKASI SOSIOLOGI EKONOMI DALAM MENGANALISIS SUATU FENOMENA SOSIAL

Pokok Perhatian

Fenomena sosial seperti kemiskinan merupakan salah satu fokus perhatian peneliti ataupun akademisi dari sub disiplin Sosiologi Ekonomi. Dasar pemikirannya adalah bahwa pembangunan suatu negara tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga harus dilihat dari segi pemerataan pembangunan itu sendiri sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Ketidakmerataan dalam suatu pembangunan nasional sesungguhnya tidak terbatas dari masalah kemiskinan saja. Golongan masyarakat miskin muncul sebagai akibat perubahan struktur ekonomi menuju modern yang tidak seimbang. Bila dalam suatu pembangunan mengabaikan pemerataan ekonomi maka dampak yang timbul dari pembangunan tersebut adalah masalah-masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam hal ini tentu sangat erat pertaliannya dengan masalah struktur ataupun kelembagaan penyediaan input produksi, proses produksi, hingga pada distribusinya.

Pemerataan input merupakan usaha untuk mendistribusikan kesempatan-kesempatan dalam segala sektor kehidupan masyarakat dengan seadil-adilnya dengan mengusahakan program-program penunjang sebagai suatu proses awal. Kemudian berlanjut pada

pemerataan proses, yang mulai membedakan faktor status sosial, suku, pendidikan, agama dan kondisi ekonomi. Sedangkan pemerataan distribusi output cenderung melihat bagaimana keberhasilan seseorang dalam mengakomodasikan kesempatan-kesempatan pemerataan yang telah diberikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Sepanjang penelusuran atas perkembangan studi-studi Sosiologi Ekonomi di Indonesia, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar studi diarahkan terhadap bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Topik itu sering tidak terpisahkan dengan topik-topik kemiskinan yang menjadi fokus perhatian studi Sosiologi Ekonomi, hingga mengarah pada model pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada sisi lain, dampak pembangunan nasional terutama sejak masa orde baru juga banyak diteliti mengingat kebijakan pembangunan hingga saat ini dilihat belum mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, bahkan terkesan belum berhasil menciptakan inklusifitas dalam pembangunan di segala sektor. Adapun teori yang digunakan sebagian besar menerapkan teori-teori ataupun konsep Kapital Sosial, teori pilihan rasional, dan teori-teori kelembagaan. Jumlah studi ini secara kuantitatif relatif banyak, bahkan telah menghasilkan sekian banyak disertasi.

Pada beberapa waktu terakhir mulai marak diteliti mengenai tindakan ekonomi aktor dalam dinamika pembangunan nasional, tentunya dengan aplikasikan Sosiologi Ekonomi. Studi Sosiologi Ekonomi mulai merambah ke sektor tenaga kerja, sektor industri terutama industri tekstil yang pernah menjadi harapan perekonomian masyarakat, dan tentunya studi-studi Sosiologi Ekonomi yang menganalisis struktur dan kelembagaan ekonomi petani, mengingat masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih tergantung sektor pertanian. Berlatar belakang dari hal tersebut, pada bagian ini akan diuraikan secara ringkas beberapa studi-studi yang mengaplikasikan Sosiologi Ekonomi, antara lain meliputi studi-studi kemiskinan dan kesejahteraan, studi-studi bidang ketenagakerjaan, kelembagaan ekonomi masyarakat, serta studi-studi kebijakan pembangunan.

Studi Kemiskinan

Orientasi utama studi-studi mengenai kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita kemerdekaan Indonesia seperti yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang “adil dan makmur”. Meskipun banyak studi-studi mengenai kemiskinan yang telah dilakukan di Indonesia, pada pembahasan ini penulis mengemukakan pendapat Sitorus (1999) mengenai bagaimana ia menyarikan hasil-hasil penelitian Sajogyo yang terkenal dengan teori garis kemiskinan (1971) dan pemikiran lainnya yang lahir dari studi-studi yang dilakukan hingga penghujung tahun 2000-an, mengenai bagaimana pembangunan pertanian mampu memakmurkan masyarakat petani.

Pertanian sebagai salah satu kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian karena seperti diketahui bahwa pertanian adalah dasar pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan itu, Sitorus (1999) mengemukakan beberapa proposisi yang disarikan dari hasil penelitian-penelitian Sajogyo mengenai kemiskinan di Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan yang sebagian besar menggeluti kegiatan ekonomi usahatani. *Proposisi pertama* bahwa kondisi kemiskinan adalah hasil konstruksi yang bersifat struktural. Kemiskinan secara kuantitatif diukur dengan Indeks Mutu Hidup yang terdiri dari indikator-indikator komposit seperti tingkat melek huruf, pendidikan, tingkat kematian bayi, harapan hidup, dan fertilitas yang mencerminkan ukuran sosiologis, bukan seperti indikator lainnya yang lebih bersifat ukuran ekonomi.

Di Indonesia, perkembangan studi mengenai kesejahteraan pada beberapa waktu terakhir ini masih relatif tertinggal jika dibandingkan pada dekade 1980-an yang relatif marak melalui studi kemiskinan, ataupun studi kemakmuran dan pemerataan pembangunan, termasuk studi mengenai kualitas hidup masyarakat yang sudah tentu sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pada perkembangannya, tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan indikator fisik, melainkan telah mulai digagas mengenai indikator non fisik seperti peran kebijakan negara maupun ketersediaan potensi kapital, terutama kapital sosial (Castelli *et al.*, 2009).

Proposisi kedua adalah pencapaian kondisi kemakmuran masyarakat memprasyaratkan kondisi keadilan dalam alokasi sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini jelas sekali dimensi ruang-ruang inklusif menjadi salah satu fokus perhatian dalam studi-studinya Sajogyo. Gambaran inklusifitas dikemukakan dengan menganjurkan konsepsi “delapan jalur pemerataan” yang saat pemerintahan orde baru menjadi salah satu andalan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) sebagai amanat dari UUD 1945 sebelum diamandemen.

Proposisi ketiga tentang transformasi menuju struktur kemakmuran menemukan pola idealnya dalam gerakan masyarakat yang dijiwai moral solidaritas sosial seperti yang digagas Durkheim, baik solidaritas mekanik maupun sebaliknya solidaritas organik yang sarat dengan pamrih. Gerakan sosial yang mesti digagas adalah mengembangkan dan memberdayakan kelompok-kelompok kecil keswadayaan dan mengembangkan hubungan kemitraan antara elit dan masyarakat, dan juga hubungan antar aktor di setiap lapisan masyarakat.

Proposisi keempat adalah bahwa gerakan masyarakat berorientasi kemakmuran memprasyaratkan adanya ruang sosial otonom yang bebas dari dominasi struktural kekuatan politik supra lokal. Dalam hal ini dampaknya mulai menunjukkan perubahan yang berarti sejak masa reformasi yang mengedepankan aspek demokrasi dan desentralisasi terutama dengan didukung undang-undang mengenai otonomi daerah (UU. No. 22 tahun 1999). Sementara itu, terdapat pula studi yang mengkaitkan kemiskinan dengan kapital sosial seperti yang dilakukan Prayitno (2004). Studi untuk disertasinya itu salah satunya mengungkapkan bahwa keluarga miskin yang memiliki ketahanan ekonomi dicirikan dengan adanya kapital sosial.

Studi-studi Bertemakan Kapital Sosial.

Di Indonesia, studi-studi sosiologi ekonomi yang berkembang pesat saat ini adalah studi yang mengambil topik kapital sosial dikaitkan dengan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi wilayah, termasuk yang banyak diinisiasi oleh World Bank. Beberapa

hasil studi yang dituangkan dalam disertasi antara lain dilakukan oleh Ibrahim (2002) yang memusatkan perhatiannya pada aspek kehidupan berorganisasi sebagai modal sosial komunitas, kemudian Nurnayetti (2006) yang menganalisis kapital sosial dan pemberdayaannya dalam pengelolaan irigasi di Sumbar; dan masih banyak studi lainnya, termasuk studi kuantitatif yang dilakukan oleh Vipriyanti (2007) yang menganalisis bagaimana keterkaitan antara kapital sosial dengan pembangunan ekonomi wilayah. Selain itu, studi mengenai kapital sosial juga dilakukan atas inisiasi World Bank yang antara lain dilakukan Grootaert (1999) yang menganalisis mengenai kepadatan jaringan sosial.

Studi-studi itu secara umum memiliki persamaan dalam hal konsep yang digunakan, ataupun indikator dan metode pengukuran yang digunakan. Indikator kapital sosial masih bertumpu pada norma, aspek kepercayaan, dan jaringan sosial, dengan perkembangan pada aspek detailnya pengukuran indikator seperti yang ditunjukkan oleh Vipriyanti (2007) dengan mengukur tingkat *trust* (meliputi *general trust*, *thin trust*, dan *thick trust*), demikian juga pengukuran jaringan sosial dengan menambahkan indeks kepadatan jaringan kerja dan indeks partisipasi dalam analisisnya, selain menganalisis kuat lemahnya ikatan sosial (*strong and weak ties*) dalam indikator jaringan sosial.

Penelitian Ketenagakerjaan dan Kelembagaan.

Satu hal lagi yang ingin dikemukakan mengenai studi yang relevan dengan sub disiplin Sosiologi Ekonomi adalah topik strategi nafkah atau mata pencaharian yang juga sudah barang tentu sangat erat pertaliannya dengan kesejahteraan, dan juga aspek konsumsi dalam segi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Strategi nafkah masyarakat yang dihubungkan dengan konteks transformasi struktur agraria adalah salah satu topik yang sampai kini masih banyak dilakukan terutama oleh kalangan akademisi ataupun sosiologi pertanian di Indonesia (Dharmawan, 2007). Dalam kerangka itu, topik-topik yang juga erat hubungannya dengan itu adalah mengenai sistem okupasi dan ketenagakerjaan yang juga masih banyak digeluti dalam

mengembangkan ranah akademis, khususnya untuk sub disiplin Sosiologi Ekonomi.

Topik mengenai kelembagaan ekonomi, seperti lembaga koperasi, perbankan, lembaga pemasaran, hingga lembaga keuangan yang sangat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, relatif masih belum banyak mendapat perhatian para akademisi atau peneliti dari sub disiplin Sosiologi Ekonomi. Dalam kerangka ini, Rintuh dan Miar (2003) mengemukakan pandangan bahwa pembahasan mengenai pentingnya penguatan kelembagaan mesti menjadi salah satu fokus studi mengingat kelembagaan merupakan penggerak pembangunan dan ekonomi rakyat. Kelembagaan yang dimaksud meliputi kelembagaan yang terbentuk akibat ikatan sosial, maupun sebagai hubungan ekonomi dalam masyarakat. Koperasi sebagai salah satu kelembagaan ekonomi relatif banyak mendapat perhatian, disamping kelembagaan lainnya seperti kelembagaan pasar, kelembagaan pendidikan dan penyuluhan, kelembagaan pembangunan lokal, dan kelembagaan permodalan atau keuangan.

Hal yang terakhir ini, telah relatif banyak menjadi fokus perhatian peneliti, seperti halnya yang telah dilakukan oleh Sira (2009) yang melakukan studi mengenai lembaga keuangan mikro yang berdasar syariah. Penelitian ini pada intinya mengkaji secara sosiologis lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Studi ini secara ringkas dapat menjelaskan bagaimana sistem bagi hasil dalam sistem keuangan syariah (tradisi) bersifat hybrid karena merupakan kelembagaan sosial informal yang diadopsi dan dikontekstualisasikan dalam sebuah makna dan kondisi tertentu sebagai sistem kelembagaan keuangan yang khas. Pada sisi lainnya, harus disadari bahwa studi-studi mengenai kelembagaan ekonomi masih perlu digeluti secara mendalam, terutama mengkaji mengenai kelembagaan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan di Indonesia, serta kelembagaan pemasaran yang kita yakini akan relatif mampu memberikan arah bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu, aspek kelembagaan keuangan terutama dalam pembangunan ekonomi pedesaan telah banyak diteliti oleh Pusat Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi Pertanian, yang antara lain dilakukan

oleh Ashari (2006) mengenai lembaga keuangan mikro di perdesaan.

**PENERAPAN SOSIOLOGI EKONOMI
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
MASYARAKAT: Tinjauan Atas Pemerintah-
Swasta-Masyarakat dalam Pembangunan
Ekonomi Masyarakat**

**Kebijakan Pembangunan Ekonomi di
Indonesia**

Pembahasan pada bagian ini perlu diawali dengan mengemukakan pendapat Rahardjo (2009) mengenai teori pembangunan Dunia Ketiga, mengingat hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana dinamika kebijakan pembangunan sosial ekonomi di Indonesia yang senyatanya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Menurut di Dunia Ketiga berkembang dua perspektif dan pendekatan. Pertama perspektif kapitalisme pasar bebas dengan pendekatan kapital, dan yang kedua adalah perspektif sosialis dengan pendekatan sumber daya manusia.

Kegagalan dua perspektif itu menghasilkan perspektif yang bersifat alternatif, yaitu aliran sosial demokrasi di dunia maju dan aliran strukturalis di Dunia Ketiga. Di Indonesia sendiri pendekatan strukturalis melahirkan alternatif aksiologi menuju perekonomian mandiri yang terjadi setelah terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dan terbangunnya prasarana dan ketersediaan teknologi tepat guna, tentu dengan catatan dapat dimanfaatkan dan diberdayakan secara merata dan adil bagi masyarakat.

Sementara pendapat Damanhuri (2009) mengemukakan bahwa selaras dengan sumber normatif pembangunan perekonomian nasional seperti yang tercantum dalam beberapa pasal UUD 1945, maka secara ideologis jelas posisi kebijakan-kebijakan pembangunan yang diambil sangat dekat dengan aliran atau mazhab sosial demokrat dengan melaksanakan model negara kesejahteraan / MNK (*Welfare State Model*).

Model negara kesejahteraan ini membangun sistem perekonomian masyarakatnya melalui beberapa ciri-ciri dari MNK seperti

berikut: (i) Adanya peranan negara yang sedemikian luas, bersih dan kredibel yang mampu melaksanakan politik redistribusi kekayaan antara lain melalui kebijakan pajak progresif. Ciri ini tentu erat kaitannya dengan bagaimana suatu negara melalui pemerintahannya mampu menciptakan ruang inklusifitas dalam pembangunannya; (ii) Terdapat kebebasan pers dan politik yang luas dengan mekanisme pasar yang sehat, dengan melibatkan peran swasta yang juga luas mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang dijalankan secara konsekuen dan konsisten; (iii) Berkembangnya peran masyarakat yang diindikasikan dari pentingnya peran serikat pekerja, peran berbagai organisasi dan profesi dalam bingkai masyarakat madani (*civil society*); (iv) Terdapat peran penting koperasi dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial masyarakat seperti yang ditunjukkan dalam perekonomian di negara-negara Skandinavia yang berhasil mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat pada level tertinggi karena keberhasilan pengembangan koperasinya.

Dalam kerangka pelaksanaan model negara kesejahteraan, terdapat satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari para peminat dan pemikir Sosiologi Ekonomi di Indonesia, yakni sejauh mana studi-studi mengenai koperasi sebagai bentuk soko guru perekonomian masyarakat yang berlandaskan kekeluargaan dapat dijadikan wadah untuk berusaha mencapai kesejahteraan dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosiologis dan sumberdaya lokal. Pada sisi lain, sistem kapitalisme mesti diantisipasi dengan tetap bersandar pada kerangka ideologis perekonomian Indonesia seperti yang diamanatkan UUD 1945.

Senyatanya terdapat satu pelajaran penting untuk dicermati mengenai kegagalan kapitalisme atau oleh Achwan (2009) disebut sebagai superkapitalisme yang berkembang saat ini, yakni dengan munculnya fenomena krisis keuangan global akhir-akhir ini. Superkapitalisme itu dicirikan oleh dominasi sistem keuangan dalam menggerakkan sistem keuangan dan sistem ekonomi dunia. Lebih lanjut diutarakan bahwa sistem superkapitalisme juga ditandai oleh hilangnya hubungan sosial antara pemerintah, swasta dalam hal ini pemilik saham, dan masyarakat konsumen.

Peran Tripartit Pemerintah-Swasta-Masyarakat

Hubungan dan peran antara negara (pemerintah), korporasi (swasta), dan masyarakat sering menjadi topik menarik dalam menganalisis teori-teori pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini banyak disoroti oleh Martinussen (1997), dalam bukunya *Society, State, & Market: A Guide to Competing Theories of Development*. Pembahasan mengenai peran pemerintah, swasta dan masyarakat yang pada sebagian besar studi-studi belakangan ini disebut sebagai hubungan tripartit, senyatanya melihat bagaimana peran masing-masing kekuatan tripartit tersebut dalam pembangunan, hingga mengkaji juga pola hubungan dan dominasi peran elemen-elemen pembangunan tersebut.

Sementara itu, dalam pembangunan pertanian di Indonesia yang merupakan bagian dari pembangunan sosial ekonomi nasional, peran pemerintah, swasta dan masyarakat juga dikemukakan oleh Arifin (2005) terutama untuk menyoroti paradigma kebijakan dan strategi revitalisasi pertanian nasional. Menurutnya, pengembangan industrialisasi pertanian dengan menerapkan strategi kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat adalah suatu strategi yang baru berkembang pada beberapa waktu belakangan ini.

Lebih lanjut Arifin (2005) mengemukakan elemen *pertama* dalam kemitraan tripartit adalah negara ataupun pemerintah yang merupakan lembaga publik dengan fungsi menyelenggarakan dan menciptakan kesejahteraan umum, yang antara lain dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan. Pada kerangka ini, peran pemerintah (negara) dalam falsafah kemitraan tripartit bergeser dari yang semula sebagai penggerak utama pembangunan, ke arah peran sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan sosial ekonomi.

Peran tersebut meliputi perumusan kebijakan, fasilitasi infrastruktur, penyediaan dan pengembangan inovasi teknologi, dukungan subsidi, anggaran pembangunan yang berprinsip berkeadilan dan dukungan politik bagi pengembangan usaha pertanian. Lembaga ini memiliki kekuasaan yang bersifat regulatif yang berperan dalam mengatur kehidupan bersama. Dalam aspek ini, dapat dijelaskan fungsi negara sebagai pengatur

elemen-elemen pembangunan. *Kedua*, adalah elemen swasta atau korporasi yang memiliki ruang gerak pada area publik melalui produksi hingga transaksi jual-beli barang dan jasa yang berorientasi pada keuntungan. Dunia usaha ini baik langsung maupun tidak langsung memiliki peran yang sedemikian penting bagi pembangunan sosial ekonomi nasional.

Pada perkembangan terkini, sorotan yang relatif tajam sering tertuju pada peran dunia usaha yang dianggap mementingkan orientasi maksimalisasi keuntungan dan melupakan falsafah moral maupun tanggung jawab sosial. Aspek yang terakhir ini berkembang dan sering dikaji sebagai suatu pembahasan yang memunculkan paradigma baru "*Corporate Social Responsibility/CSR*" yang mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan sosial ekonomi nasional.

Elemen *Ketiga*, adalah masyarakat yang berinteraksi pada ruang publik atas dasar tata nilai dan perilaku sosial tertentu, yang saat ini tidak lagi hanya menjadi obyek pembangunan, melainkan bergeser perannya sebagai subyek yang menentukan pembangunan sosial ekonomi bangsa. Peran dan hubungan simteris dari ketiga elemen pembangunan itu, merupakan prasyarat utama dalam strategi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, seperti yang banyak diungkapkan dalam beberapa hasil studi belakangan ini.

Di Chili, Campana (2000) mengemukakan bahwa kemitraan (*partnership*) antara pemerintah, swasta, dan institusi multilateral yang berkembang dalam komunitas lokal ternyata mampu menekan angka kemiskinan masyarakat di pedesaan Chili, melalui program-program pembangunan pertanian yang diinisiasi pemerintah Chili. Dalam konteks operasionalisasi program pembangunan pertanian, keterlibatan dan dukungan lembaga swadaya masyarakat (NGO's) sangat kental terutama melalui inisiatifnya dalam mengembangkan demokratisasi proses pembangunan yang diawali dari perencanaan dan desain program hingga kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian di Chili.

Hubungan antara komunitas desa melalui organisasi-organisasi sosial desa dengan LSM pertanian maupun dengan pemerintah sedemikian kuat terutama dalam proses

transfer teknologi, sehingga mampu meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di pedesaan Chili. Hasil studi lainnya juga dikemukakan oleh Jiwa (2005) yang mengemukakan mengenai model hubungan tripartit dalam mendukung usaha produksi madu di Kenya. Pada intinya, Jiwa (2005) menggambarkan "*Honey Care's Tripartite Model*" antara pemerintah-sektor swasta-komunitas desa mampu mempromosikan usaha kecil ke arah pengembangan komunitas berkelanjutan.

PENUTUP

Kecendrungan sosiolog memperluas fokus analisis pada bidang yang menjadi tradisi kajian ekonomi melahirkan sub disiplin Sosiologi Ekonomi. Perspektif sosiologis yang digunakan atau diterapkan dalam fenomena ekonomi, terutama yang terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa, yang bermuara pada bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraannya. Kontribusi sub disiplin Sosiologi Ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan pembangunan.

Sepanjang penelusuran atas perkembangan studi-studi Sosiologi Ekonomi di Indonesia, hingga saat ini fokus studi masih banyak menganalisis struktur, kelembagaan dan sistem ekonomi nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi nasional yang dimaksud adalah yang sejalan amanat UUD 1945, yang bercirikan (1) APBN dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, (2) penciptaan kesempatan kerja penuh, (3) sistem perekonomian yang berdasarkan kekeluargaan dengan menolak *free fight liberalism* dalam era globalisasi ekonomi dunia saat ini dan (4) melaksanakan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*).

Keberhasilan negara-negara penganut model negara kesejahteraan sangat nyata bila ditinjau dari indikator pembangunan ekonomi. Hal itu terlihat dari "pemerataan" pembangunan sebagai obsesi utama dari negara-negara penganut model negara kesejahteraan atau-

pun penganut aliran sosial demokrat dalam mengatasi ketimpangan sosial. Masalah ketimpangan sosial senyatanya telah menjadi fokus perhatian dalam operasionalisasi kebijakan pembangunan disegala sektor, dengan upaya peningkatan sinergitas peran dan hubungan antara negara (pemerintah), korporasi (swasta), dan masyarakat. Hal ini sering menjadi topik menarik dalam menganalisis teori-teori pembangunan sosial ekonomi masyarakat kita saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achwan, R. 2009. Sosiologi dan Krisis Keuangan Global. OPINI: Harian KOMPAS tanggal 2 April 2009.
- Ashari. 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol. 4 No.2. 2006: 146-164. PSEKP. Bogor.
- Ashari. 2009. Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 27. No.1 2009. PSEKP. Bogor.
- Arifin, B. 2005. Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi. PT. Grasindo. Jakarta
- Bourdieu, P. 1986. The Forms of Capital. Dalam J Richardson, ed. Handbooks of Theory and research for Socoiology of Education. Westport, CT:Greenwood Press.
- Campana, P. 2000. Tripartite Partnerships for Poverty Alleviation and Food Security through Projects and Programmes. International Fund for Agricultural Development Latin America and The Caribbean Division. Rome.
- Castelli, A., Jacob R., and Goddard M. 2009. Exploring the Impac of Public Services on Quality of Life Indicators. CHE Research Papaer 46. University of York. United Kingdom.
- Coleman, J.S. 1988. Social Capital in The Creation of Human Capital. American Journal of Sociology. Volume 94.
- Coleman, J.S. 1990. Foundation of Social Theory. Cambridge MA. Belknap
- Damanhuri, D.S. 2009. Indonesia: Negara, Civil Society dan Pasar dalam Kemelut Globalisasi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekoonomi, Univesitas Indonesia. Jakarta.

- Dasgupta P dan Serageldin I. 2002. *Social Capital: A Multi Faceted Perspective*. World Bank, Washington.
- Davis, J. dan Goldberg, R. 1957. *A Concept of Agribusiness*. Harvard University, Boston, USA *dalam* Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. PT. Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Dharmawan, A.H. 2007. *Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology)*. SODALITY: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekolog Manusia. Vol. 01. No. 02. 2007. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. IPB. Bogor.
- Granovetter, M. 2005. *The Impact of Social Structure on Economic Outcomes*. *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 19. Number 1.
- Grotaert, C. 1999. *Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia*. World Bank Working Paper, unpublished
- Heilbroner, R.L. 1986. *The Nature and Logic of Capitalism*. WW. Norton & Co. Inc. (Revised Edition).
- Ibrahim, L.D. 2005. *Kehidupan Berorganisasi sebagai Modal Sosial* Disertasi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Jiwa, F. 2005. *Honey Care Africa's Tripartite Model: An Innovative Approach to Sustainable Beekeeping in Kenya*. APIACTA. Kenya
- Johnson, D.P. 1988. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang)*. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta.
- Lawang, R.M.Z. 2005. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*. (Cetakan Kedua). FISIP UI Press. Depok.
- Lawson, T., Jones, M., dan Moores R. 2000. *Advanced Sociology Through Diagrams*. Oxford University Press. Oxford New York
- Levitte, Y. 2004. *Bonding Social Capital in Entrepreneurial Developing Communities-Survival Networks or Barriers?*. *Journal of the Community Development Society*. Columbus:2004. Vol.35.
- Martinussen, J. 1997. *Society, State, & Market: A Guide To Competing Theories of Development*. Danish Association for International Co-operation. Copenhagen.
- Lin, N. 2000. *Inequality in Social Capital*. *Contemporary Sociology*. Washington: Nov 2000. Vol. 29.
- Nee, Victor, "The New Institutionalisms in Economics and Sociology," in Smelser J. Neil and Richard Swedberg (eds), in *the Handbook of Economic Sociology*. Princeton University Press, 2005.
- Prayitno, U.S. 2004. *Modal Sosial dan Ketahanan Ekonomi Keluarga*. Disertasi. FISIP. Universitas Indonesia.
- Putnam, R. 1993. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rahardjo, M.D. 1984. *Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Rahardjo, M.D. 2009. *Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia*. PRISMA (Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi). Vol. 28 No.2, Oktober 2009. LP3ES. Jakarta.
- Rintuh, C. dan Miara. 2003. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. PUSTEP. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ritzer, G. dan Goodman D.J., 2003. *Modern Sociological Theory*. Mc.Graw-Hill.
- Roth, G. dan Wittich. 1978. *Max Weber: Economy and Society*. University of California Press. Berkeley.
- Rothstein B. *Social Trust and Honesty in Government: A Causal Mechanisms Approach*. New York. Palgrave Macmillan.
- Sira, M. A. 2009. *Institusionalisasi Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro*. Disertasi. FISIP, Program Sosiologi. Universitas Indonesia.
- Sitorus, M.T.F. 1999. *Menuju Sosiologi Kemakmuran: Mencari Kerangka untuk Pemikiran Sajogyo*. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi, IPB. Bogor.
- Smelser J. Neil and Richard Swedberg. 2005 ("Introducing Economic Sociology") (eds), in *the Handbook of Economic Sociology*. Princeton University Press.
- Sukidin. 2009. *Sosiologi Ekonomi*. Center for Society Studies. Jember.
- Vipriyanti, N.U. 2007. *Studi Sosial Ekonomi Tentang Keterkaitan Antara Modal Sosial dan Pembangunan Wilayah: Disertasi Pascasarjana IPB*. Bogor
- Woolcock M. dan Narayan D. 2000. *Social Capital: Implication for Development Theory, Research, and Policy*. *The World Bank Research Observer*. Vol.15.No.2 (Agustus 2000).